

**PENGARUH PENJUALAN BERSIH DAN BEBAN KOMERSIAL
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE
2016 - 2017**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi S1 Akuntansi



Oleh:

Nama : Adi Prana Sadewa
NPM : 1405170548
Program Studi : S1 Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUHKAN

Nama : ADY PRANA SADEWA
 NPM : 105170548
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Skripsi : PENGARUH PENJUALAN BERSIH DAN BEBAN KOMERSIAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN TERBESAR PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BELPERIODE 2016-2017

Dinyatakan : (A/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji I

Drs. H. SUCIPTO, Ak. MM

Penguji II

HENDRA HARMAIN, SE, M.Pd

Pembimbing

IHSAN RAMBE, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : ADI PRANA SADEWA
N.P.M : 1405170548
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH PENJUALAN BERSIH DAN BEBAN
KOMERSIAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
TERUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016 – 2017.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

IHSAN RAMBE, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si



Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI., SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : ADI PRANA SADEWA
NPM : 1405170548
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 15. OKT. 2018

Pembuat Pernyataan



Handwritten signature of Adi Prana Sadewa

ADI PRANA SADEWA

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ADI PRANA SADEWA
N.P.M : 1405170548
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH PENJUALAN BERSIH DAN BEBAN
KOMERSIAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
TERUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2017

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
2/10/2018	perbaikan - perubahan - isi - konsep dan		
4/10/2018	perbaikan kembali		
11/10/2018	perbaikan kembali		
15/10/2018	Sec. Hj. Nuzul Hidayat		

Dosen Pembimbing

(IHSAN RAMBE, SE., M.Si)

Medan, Oktober 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

ABSTRAK

ADI PRANA SADEWA : 1405170548. PENGARUH PENJUALAN BERSIH DAN BEBAN KOMERSIAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016 – 2017. SKRIPSI, 2018.

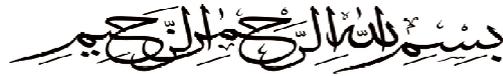
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penjualan bersih yang dilihat dari total penjualan bersih dan beban komersial yang dilihat dari total beban yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2017. Jenis penelitian ini adalah asosiatif - kausal dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 66 perusahaan dengan metode pengambilan sampel *purposive sampling* sehingga diperoleh 30 perusahaan sampel sebagai objek penelitian yaitu 60 unit analisis (30 x 2 tahun pengamatan). Data yang digunakan adalah laporan keuangan dan laporan tahunan masing-masing perusahaan sampel. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan bersih secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pajak penghasilan terutang. Begitu pula dengan beban komersial berpengaruh secara parsial terhadap pajak penghasilan terutang. Secara simultan penjualan bersih dan beban komersial berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang.

Kata Kunci : Penjualan Bersih, Beban Komersial, Pajak Penghasilan Terutang.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi. Adapun judul Skripsi yaitu : **“Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Komersial terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 - 2017”**

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan Skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa terima kasih untuk Ayahanda Suparna dan Ibunda Muslimah, serta Alm. Baldatun (Mama) tercinta yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung penulis dalam pembuatan Skripsi ini. Dan seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si. selaku sekretaris program studi Akuntansi.
8. Bapak Ihsan Rambe, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis, serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi

dan Bisnis yang telah membantu penulis baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan Skripsi ini.

10. Kepada para dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam mengerjakan Skripsi ini dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis hanya bisa berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Skripsi ini dari semua pihak.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap Skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Oktober 2018
Penulis

ADI PRANA SADEWA
1405170548

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan dan Rumusan Masalah	8
1. Batasan Masalah	8
2. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teori.....	11
1. Laporan Keuangan.....	11
2. Penjualan	12
3. Beban Komersial	13
a. Beban Pokok Penjualan	14
b. Beban Usaha.....	15
c. Beban Lain –Lain.....	15
4. Pajak	16
a. Pengertian Pajak.....	16
b. Subjek Pajak.....	17
c. Objek Pajak	18
d. Fungsi Pajak.....	19
e. Sistem Pemajakan Penghasilan	20
f. Biaya menurut Undang – Undang Perpajakan	24
g. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang	31
B. Kerangka Konseptual.....	32

C. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Definisi Operasional Variabel	35
1. Variabel Dependen (Y)	35
a. Pajak Penghasilan Terutang	35
2. Variabel Independen (X).....	36
a. Penjualan Bersih.....	36
b. Beban Komersial	37
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
D. Populasi dan Sampel	37
1. Populasi Penelitian.....	38
2. Sampel Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
1. Statistik Deskriptif	40
2. Asumsi Klasik.....	40
a. Uji Multi kolinearitas.....	40
b. Uji Autokorelasi	40
c. Uji Heteroskedastisitas	41
d. Uji Normalitas	42
3. Metode Analisis	43
4. Uji Hipotesis	44
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	44
b. Uji Parsial (Uji t)	44
c. Uji Simultan (Uji F).....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Statistik Deskriptif	47
2. Uji Asumsi Klasik.....	49
a. Uji Multikolinearitas	49
b. Uji Autokorelasi	49

c. Uji Heteroskedastisitas	50
d. Uji Normalitas	51
3. Metode Analisis (Analisis Regresi Linear Berganda).....	53
4. Uji Hipotesis	55
a. Uji koefisien Determinasi	55
b. Uji Simultan (Uji F).....	56
c. Uji Parsial (Uji T).....	57
B. Pembahasan	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Penjualan Bersih, Beban Komersial dan PPh terutang 5	5
Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian..... 37	37
Tabel 3. 2 Proses Pengambilan Sampel 39	39
Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif 48	48
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolonieritas 49	49
Tabel 4. 3 Hasil uji <i>Durbin Watson</i> (DW Test). 50	50
Tabel 4. 4 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov 53	53
Tabel 4. 5 Regresi Linear Berganda 54	54
Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi 55	55
Tabel 4. 7 Hasil Uji Simultan (Uji F) 56	56
Tabel 4. 8 Hasil Uji Parsial (Uji T) 57	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	33
Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
Gambar 4. 2 Hasil Uji normalitas P-Plot	52
Gambar 4. 3 Hasil Uji normalitas Histogram.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan catatan yang memuat informasi tentang gambaran kinerja keuangan dan kinerja manajemen suatu perusahaan dalam periode tertentu. Suatu Laporan Keuangan harus disajikan secara wajar dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Menurut PSAK No. 1 tujuan dari laporan keuangan itu sendiri adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber - sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam PSAK No. 1 paragraf 7, Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Salah satu jenis laporan keuangan yang dengan jelas merefleksikan keberhasilan perusahaan adalah laporan laba rugi. Menurut Harahap (2012: 73), laporan laba rugi menggambarkan hasil yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan selama satu periode tertentu, serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut. salah satu informasi penting yang harus disajikan pada laporan laba rugi perusahaan manufaktur adalah penjualan yang merupakan pendapatan sebagai hasil yang timbul dari aktivitas normal perusahaan. Tujuan umum penjualan adalah untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, dan mempertahankan atau bahkan meningkatkannya untuk jangka waktu yang lama.

Banyak hal yang dapat mempengaruhi kondisi penjualan perusahaan, yaitu kondisi pasar, ketersediaan bahan baku, kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dan sebagainya. Terdapat dua kebijakan yang berlaku di Indonesia, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter dalam bidang perekonomian yang dicanangkan oleh pemerintah berpotensi memberikan pengaruh terhadap perusahaan, yaitu implikasi terhadap kegiatan usaha dan laba perusahaan. Pieloor (2010:214) berpendapat bahwa kebijakan moneter dan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti peraturan perpajakan, kebijakan tingkat suku bunga, belanja pemerintah, serta tingkat inflasi yang terjadi dapat memberi pengaruh positif, negatif, maupun netral terhadap pendapatan, pengeluaran, dan laba perusahaan.

Berbicara mengenai kegiatan usaha yang dilakukan di sebuah negara, kita tidak dapat terlepas dari pajak. Pajak sebagai pengeluaran yang manfaatnya tidak dapat kita rasakan langsung menjadi kewajiban untuk setiap warga negara yang menjalankan usaha dan mendapatkan hasil atau laba dari usaha yang dijalankannya di negara yang ditinggalinya. Kaitan atau hubungannya sangat jelas, bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi industri (perusahaan) dan bagaimana laba perusahaan mempengaruhi penerimaan pajak. Indonesia sebagai negara yang masih termasuk dalam kondisi negara berkembang masih sangat mengandalkan pajak yang merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Sehingga pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha dengan keras agar target penerimaan pajak seperti yang telah diestimasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN) dapat tercapai seoptimal mungkin Setiyadi (2009 : 1). Hal ini dapat dilihat dari bagaimana gencarnya pemerintah dalam beberapa tahun belakangan mengeluarkan aturan – aturan agar kesadaran para wajib pajak dalam hal pembayaran pajak meningkat dan diiringi dengan penerimaan pajak yang semakin meningkat pula, seperti diterbitkannya PMK Nomor 15 tahun 2008, diberlakukannya *Tax Amnesty*, dan perpanjangannya yaitu *Tax Amnesty* jilid II.

Pajak perusahaan atau yang dikenal dengan pajak penghasilan badan memiliki kontribusi paling besar dibanding pajak penghasilan lainnya, seperti pph pasal 21, pph pasal 22, pph pasal 22 impor, pph pasal 23, pph pribadi, dan pph pasal 26. Pajak penghasilan badan mengalami fluktuasi dari tahun 2010 – 2016. Hal ini yang membuat tertarik ingin meneliti pajak penghasilan badan. Adapun empat sektor yang dominan berkontribusi dalam penerimaan pajak penghasilan badan adalah industri manufaktur, pertambangan, keuangan, dan perkebunan. Direktorat Jenderal Pajak, (2015).

Menurut PSAK No. 46 paragraf 57 salah satu unsur beban (penghasilan) pajak yaitu beban (penghasilan) pajak kini (*Current Tax*), yaitu jumlah pajak penghasilan terutang (*Payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Bagian di dalam laporan keuangan yang mendapat perhatian khusus adalah laba. Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) Nomor 2 (FASB 1987) merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. Kemudian dijelaskan pula pada Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan (KDPPLK) tahun 2012, laba merupakan kinerja penghasilan bersih sering kali digunakan sebagai ukuran

kinerja atau dasar bagi ukuran yang lain. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Pada umumnya manajemen perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang kecil sehingga mereka melaporkan laba bersih yang kecil.

Pada penelitian ini, data penjualan bersih, beban komersial dan pajak penghasilan terutang perusahaan manufaktur yang diperoleh dari website BEI menunjukkan bahwa ada beberapa perusahaan yang penjualan bersihnya meningkat, akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pada pajak penghasilan terutangnya. Untuk beban komersial, data juga menunjukkan ada beberapa perusahaan yang beban komersial nya meningkat tetapi tidak diikuti oleh penurunan pajak penghasilan terutangnya. Hal ini terlihat jelas pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1
Data Penjualan Bersih, Beban Komersial dan PPh terutang

NO.	KODE	2016		2017	
		PENJUALAN BERSIH	PPh	PENJUALAN BERSIH	PPh
1	AMIN	Rp 150.329.488.765	Rp 6.571.178.105	Rp 213.761.005.553	Rp 11.033.307.424
2	ASII	Rp 181.084.000.000.000	Rp 3.951.000.000.000	Rp 206.057.000.000.000	Rp 6.031.000.000.000
3	AUTO	Rp 12.806.867.000.000	Rp 165.486.000.000	Rp 13.549.857.000.000	Rp 164.155.000.000
4	BATA	Rp 999.802.379.000	Rp 23.070.359.000	Rp 974.536.083.000	Rp 25.869.803.000
5	BIMA	Rp 172.109.865.924	Rp 5.722.673.288	Rp 153.713.878.373	Rp 3.415.182.310
6	INDS	Rp 1.637.036.790.119	Rp 10.583.748.495	Rp 1.967.982.902.772	Rp 46.701.314.660
7	JECC	Rp 2.037.784.842.000	Rp 45.935.985.000	Rp 2.184.518.893.000	Rp 30.496.360.000
8	KBLI	Rp 2.812.196.217.447	Rp 83.529.347.037	Rp 3.186.704.707.526	Rp 70.179.398.593
9	KBLM	Rp 987.409.109.474	Rp 14.506.715.500	Rp 1.215.476.677.995	Rp 12.356.964.000
10	SCCO	Rp 3.378.572.000.577	Rp 100.356.348.982	Rp 4.440.404.595.541	Rp 83.238.075.336
11	SMSM	Rp 2.879.876.000.000	Rp 156.016.000.000	Rp 3.339.964.000.000	Rp 165.250.000.000
12	VOKS	Rp 2.022.350.276.358	Rp 34.977.988.411	Rp 2.258.316.807.862	Rp 67.408.978.068
13	CEKA	Rp 4.115.541.761.173	Rp 74.760.078.410	Rp 4.257.738.486.908	Rp 33.749.572.025
14	DLTA	Rp 774.968.268.000	Rp 72.538.386.000	Rp 777.308.328.000	Rp 89.240.218.000
15	DVLA	Rp 1.451.356.680.000	Rp 62.333.656	Rp 1.575.647.308.000	Rp 63.898.628

NO.	KODE	2016		2017	
		BEBAN KOMERSIAL	PPh	BEBAN KOMERSIAL	PPh
1	AMIN	Rp 119.665.457.658	Rp 6.571.178.105	Rp 164.801.957.053	Rp 11.033.307.424
2	ASII	Rp 163.550.000.000.000	Rp 3.951.000.000.000	Rp 185.731.000.000.000	Rp 6.031.000.000.000
3	AUTO	Rp 12.359.527.000.000	Rp 165.486.000.000	Rp 13.203.406.000.000	Rp 164.155.000.000
4	BATA	Rp 934.971.675.000	Rp 23.070.359.000	Rp 893.163.523.000	Rp 25.869.803.000
5	BIMA	Rp 154.426.246.081	Rp 5.722.673.288	Rp 137.762.084.300	Rp 3.415.182.310
6	INDS	Rp 1.548.188.004.715	Rp 10.583.748.495	Rp 1.704.193.274.630	Rp 46.701.314.660
7	JECC	Rp 1.752.351.689.000	Rp 45.935.985.000	Rp 2.014.861.729.000	Rp 30.496.360.000
8	KBLI	Rp 2.416.483.015.030	Rp 83.529.347.037	Rp 2.848.385.292.722	Rp 70.179.398.593
9	KBLM	Rp 919.788.345.434	Rp 14.506.715.500	Rp 1.159.604.094.074	Rp 12.356.964.000
10	SCCO	Rp 2.968.759.513.964	Rp 100.356.348.982	Rp 4.123.794.042.470	Rp 83.238.075.336
11	SMSM	Rp 2.250.869.000.000	Rp 156.016.000.000	Rp 2.664.341.000.000	Rp 165.250.000.000
12	VOKS	Rp 1.793.017.495.667	Rp 34.977.988.411	Rp 2.027.775.768.110	Rp 67.408.978.068
13	CEKA	Rp 3.795.709.248.642	Rp 74.760.078.410	Rp 4.097.631.014.873	Rp 33.749.572.025
14	DLTA	Rp 480.950.194.000	Rp 72.538.386.000	Rp 445.703.912.000	Rp 89.240.218.000
15	DVLA	Rp 1.122.733.009.244	Rp 62.333.656	Rp 1.365.405.132.000	Rp 63.898.628

Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan Perusahaan (www.idx.co.id)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa perusahaan pada tahun 2016-2017 dengan penjualan bersih yang meningkat akan tetapi pajak penghasilan terutang menurun, dan beban komersial mengalami peningkatan akan tetapi pajak penghasilan terutang juga ikut meningkat.

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Sanwanih (2006) penjualan mempengaruhi besarnya laba setelah pajak. Maka dapat disimpulkan besarnya

penjualan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan terutang sehingga dapat berdampak pada besarnya laba setelah pajak.

Hal ini bertentangan dengan pendapat Rudianto (2006:209), biaya komersial atau biaya operasional (*operating expenses*) merupakan biaya yang memiliki peran besar dan berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Biaya komersial dalam kegiatan usaha perusahaan berkaitan erat dengan pajak penghasilan badan suatu perusahaan. Hal ini juga dijelaskan pada Ayat 1 pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menerangkan biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan wajib pajak dalam negeri adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Secara konseptual, semakin besar biaya komersial yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Pajak Penghasilan terutang, penelitian Salamah, dkk (2015) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan, hasilnya 1) rasio *gross profit*, rasio *operating profit* dan biaya operasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan, 2) rasio *gross profit*, rasio *operating profit* dan biaya operasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan, dan 3) Biaya operasional berpengaruh dominan terhadap pajak penghasilan badan. Hernalisa (2017) meneliti tentang pengaruh penjualan usaha dan beban operasional terhadap laba bersih pada sebuah perusahaan dagang, dan hasilnya adalah kedua variabel

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada penelitian Astuti (2011) yang meneliti tentang pengaruh UU Perpajakan terhadap Laba Bersih mendapatkan hasil bahwa perubahan UU perpajakan berpengaruh dan sangat signifikan terhadap Laba bersih perusahaan. Hasil penelitian oleh Nasution (2016) yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan 21 di Indonesia, memperlihatkan bahwa Produk Domestik Bruto, BI Rate, Inflasi, Pertambahan Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Orang Bekerja, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Penanaman Modal Asing berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia. Selain itu juga ada penelitian Efilia (2014) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan usaha dan beban operasional terhadap laba bersih pada perusahaan Kimia, dan Keramik, Porselin dan Kaca yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 – 2012 dengan hasil penelitian pendapatan usaha berpengaruh terhadap laba bersih, sedangkan beban operasional tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

Berdasarkan latar belakang dan uraian penelitian – penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Komersial terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 - 2017”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil penelitian awal yang penulis lakukan, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang diperoleh, ada 6 perusahaan yang data penjualan meningkat akan tetapi pajak penghasilannya menurun.

2. Berdasarkan data yang diperoleh, ada 8 perusahaan yang data bebankomersialnya meningkat akan tetapi pajak penghasilannya juga ikut meningkat.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat batasan-batasan masalah agar masalah yang akan diteliti tetap fokus dan tidak meluas ke arah masalah-masalah yang lain. Batasan masalah penelitian ini adalah perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI dan penelitian ini hanya mengambil data penelitian laporan keuangan manufaktur untuk periode 2016 – 2017

2. Rumusan Masalah

adapun rumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah penjualan bersih berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2017 ?
2. Apakah Beban Komersial berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2017 ?
3. Apakah Penjualan bersih dan Beban komersial secara simultan berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2017 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah penjualan bersih berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2017.
- b. Untuk mengetahui apakah beban komersial berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2017.
- c. Untuk mengetahui apakah penjualan bersih dan beban komersial secara simultan berpengaruh terhadap pajak penjualan terutang pada perusahaan manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2017.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan pajak penghasilan terutang.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi informasi sekaligus perbaikan dalam hal pelaporan pajak penghasilan terutang yang benar

dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- c. Bagi pemerintah, memberikan informasi tentang bagaimana keadaan laporan keuangan serta kaitannya dengan pelaporan pajak penghasilan terutang yang selama ini dilakukan oleh perusahaan.
- d. Bagi peneliti lain, untuk menjadi sumber referensi maupun sebagai bahan teori untuk penelitian selanjutnya atau penelitian lain yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan *output* dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan Harahap, (2012:201). Menurut Rahardjo (2009:1) dalam bukunya yang berjudul Laporan Keuangan Perusahaan menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan diluar perusahaan atau yang umumnya disebut *stakeholder*. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada paragraf ke7, disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan informasi formal dan terstruktur atas operasional suatu perusahaan dan memberikan petunjuk atas penetapan kebijakan di masa yang akan datang, namun perusahaan harus membuat dua macam laporan keuangan yakni laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal

sebagaimana digunakan untuk keperluan perpajakan harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Penjualan

Penjualan adalah sumber yang paling utama dari penghasilan, biasanya selalu ditempatkan pada baris pertama laporan Laba Rugi Rahardjo, (2009:48). Penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau *suplemen* dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi Assauri, (2013:23). Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Tujuan umum penjualan adalah untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu lama. Tujuan itu dapat tercapai apabila penjualan dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan. Dengan demikian, tidak berarti bahwa barang atau jasa yang terjual akan menghasilkan laba Rahardjo, (2009:48).

Penjualan merupakan satu di antara lima konsep bersaing yang dijadikan sebagai pedoman oleh organisasi untuk melakukan kegiatan pemasaran Kotler, (2016:19). Lima konsep tersebut adalah konsep produksi, produk, penjualan, pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menjelaskan sedikit konsep penjualan, agar bahasan penelitian tetap fokus pada variabel-variabel penelitian yang diteliti dan tidak terlalu meluas.

Penjualan barang secara tunai maupun kredit dicatat dengan mengkredit penjualan. Harga Pokok Penjualan (HPP) barang yang dijual juga dicatat atas penjualan tersebut. Dalam penjualan barang secara kredit memungkinkan diberikannya diskon penjualan untuk pembayaran yang lebih cepat oleh pelanggan, diskon penjualan ini dicatat oleh penjual sebagai debet ke diskon penjualan. Diskon penjualan dilaporkan sebagai pengurang terhadap penjualan, begitupun dengan pengembalian barang (retur) atau potongan harga diberikan. Jadi penjualan bersih adalah jumlah yang diterima dari penjualan setelah dikurangi dengan nilai barang yang dikembalikan dan cadangan turunnya harga Rahardjo, (2009:48). Pada penelitian Novia Kusumadewi (2008) dan Sanwanih (2006) memperlihatkan penjualan bersih mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Pajak penghasilan terutang. Hal ini juga dapat kita lihat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-42/PJ/2013 tentang tata cara untuk mendapatkan pajak penghasilan yang diatur didalam Pasal 17 dan 31E Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana jumlah yang dikalikan ke tarif yang telah diatur adalah PKP, yaitu hasil dari peredaran bruto atau penjualan bersih yang dikurangkan dengan beban-beban yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

3. Beban Komersial

Beban (*expense*) yaitu arus keluar barang atau jasa yang dapat ditandingkan dengan pendapatan (*revenue*) untuk menentukan laba (*income*). Karena pengorbanan tersebut digunakan untuk menghasilkan

“prestasi” dan tidak memiliki masa manfaat di masa yang akan datang, maka harus dikurangkan dari laba pada periode yang bersangkutan.

Menurut Rudianto (2006:209), biaya komersial atau biaya operasional (*operating expenses*) merupakan biaya yang memiliki peran besar dan berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Biaya komersial dalam kegiatan usaha perusahaan berkaitan erat dengan pajak penghasilan badan suatu perusahaan. Ayat 1 pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menerangkan biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan wajib pajak dalam negeri adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Secara konseptual, semakin besar biaya komersial yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Beban komersial merupakan total beban yang terjadi dalam keseluruhan operasi dan aktivitas perusahaan pada periode tertentu. Beban komersial adalah penjumlahan dari beban pokok penjualan, beban usaha, dan beban lain - lain.

a. Beban Pokok Penjualan

Pada perusahaan manufaktur atau perusahaan yang memproduksi barang, harga pokok penjualan (*cost of good sold*) meliputi semua biaya yang ada dalam perusahaan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Biaya tersebut termasuk biaya bahan mentah, tenaga kerja, dan *overhead* pabrik seperti supervisi, sewa, listrik, perawatan, dan perbaikan Rahardjo, (2009:48).

b. Beban Usaha

Beban usaha (*operating expenses*) perusahaan terdiri atas biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, dan juga biaya penyusutan aktiva tetap Rahardjo, (2009:49).

1). Biaya Penjualan

Biaya penjualan biasanya dikelompokkan tersendiri sehingga pembaca perhitungan laba-rugi dapat melihat cakupan dari biaya-biaya penjualan tersebut. Misalnya gaji dan komisi untuk wiraniaga (*salesman*), biaya iklan dan promosi, dan biaya perjalanan dinas wiraniaga merupakan biaya penjualan.

2). Biaya Administrasi dan umum

Biaya ini meliputi biaya gaji pimpinan perusahaan, gaji dan upah karyawan, biaya kantor, listrik, air, telepon, alat tulis kantor, perawatan dan perbaikan, asuransi dan sejenisnya.

3). Penyusutan

disebabkan keusangan atau keausan. Misalnya penurunan nilai per tahun untuk suatu mesin yang digunakan untuk proses pabrikasi adalah suatu biaya yang harus dikurangkan sebagai tambahan pengeluaran.

c. Beban Lain –Lain

Beban lain - lain biasanya berupa beban bunga, yaitu bunga pinjaman. Bila perusahaan mengeluarkan atau mengeluarkan obligasi, maka bunga harus dibayarkan kepada pemegang obligasi karena perusahaan telah menggunakan uang yang diterima dari obligasi yang

dikeluarkan perusahaan. Beban lain bisa juga berupa bunga yang harus dibayar atas pinjaman / utang yang diterima dari bank atau lembaga keuangan lain.

4. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Resmi (2015:1-2), terdapat beberapa definisi pajak yaitu:

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat

”Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Definisi yang dikemukakan oleh Prof. DR. Rochmat Soemitra, SH.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam

Tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak. Yang dimaksud Tahun Pajak dalam Undang-Undang ini adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

b. Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah:

- 1). Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 2) Badan.
- 3) Bentuk Usaha Tetap(BUT).

Tambahan dalam Pasal 2 ayat 1 di atas bahwa BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Pada dasarnya semua penduduk Indonesia, merupakan subyek pajak, tanpa memandang umur, jenis pekerjaan atau apakah mempunyai pekerjaan atau tidak punya pekerjaan. Tuna

wisma, tuna karya, anak sekolah semuanya adalah subyek Pajak Penghasilan. Karena untuk menjadi subyek pajak tidak berkaitan dengan kedudukan atau pekerjaan seseorang.

c. Objek Pajak

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa yang menjadi obyek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan. Adapun unsur- unsur yang timbul dari definisi penghasilan yang menjadi objek pajak ini adalah:

- 1). Tambahan kemampuan ekonomis. Unsur ini memenuhi konsep akresi (*accretion concept*) atau konsep pertambahan, yang termasuk penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh WP dalam tahun pajak berkenaan.
- 2). Yang diterima atau diperoleh WP. Unsur ini memenuhi konsep realisasi (*realization concept*). Tambahan kemampuan ekonomis dapat dikatakan sebagai suatu penghasilan apabila sudah direalisasi atau secara akuntansi penghasilan tersebut sudah dapat dibukukan dengan menggunakan prinsip *cash basis*

maupun *accrual basis*.

- 3). Yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Unsur ini memenuhi konsep *world-wide-income* yaitu penghasilan yang dikenakan pajak meliputi penghasilan yang berasal dari manapun juga.
- 4). Yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli harta. Bahwa penggunaan penghasilan apakah yang akan dikonsumsi atau ditabung, semuanya dikenakan pajak.
- 5). Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Unsur ini memenuhi konsep bahwa hakikat ekonomis adalah lebih penting dari pada bentuk formal yang dipakai (*substance-over-form-principle*). Hal yang menentukan penghasilan itu merupakan obyek pajak, bukan pada bentuk yuridis, melainkan hakikat ekonomis.

d. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2015:2-3) ada dua fungsi pajak, antara lain:

- 1) Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Contoh : dimasukkan nya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- 2) Fungsi *reguler* (mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu

dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan begitu juga dengan barang mewah.

e. Sistem Pemajakan Penghasilan

Pada dasarnya menurut PSAK No. 46 terdapat beberapa prinsip dasar akuntansi Pajak Penghasilan, antara lain:

- 1) Pajak Penghasilan yang kurang dibayar tahun berjalan atau terutang diakui sebagai pajak-kini (*current tax liability*), sedang Pajak Penghasilan yang lebih bayar tahun berjalan diakui sebagai aset pajak kini (*current taxasset*).
- 2) Konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat diatribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, sedang efek perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductable temporary differences*) dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan diakui sebagai aset pajak tangguhan.
- 3) Pengukuran kewajiban dan aset pajak didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi di kemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasi.
- 4) Penilaian (kembali) aset pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan asset pajak tangguhan direalisasikan

dalam periode mendatang.

Menurut Resmi (2015:8-11) terdapat tiga tata cara pemungutan pajak, terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1) Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran.

(a) Stelsel nyata (riset stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

(b) Stelsel anggapan (*fictievestelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun sedangkan

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

(c) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggaran, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu: asas domisili (asas tempat tinggal), asas sumber, dan asas kebangsaan.

(a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri, maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri.

(b) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap

orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan atas penghasilan yang diperolehnya.

(c) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

3) Sistem pemungutan pajak

Terdiri dari beberapa macam, yaitu: *official assesment system*, *self assesment system*, dan *with holding system*.

(a) *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangan berada pada aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang perpajakan yang berlaku. Inisiatif, kegiatan menghitung, serta memungut pajak sepenuhnya dalam sistem ini berada ditangan para aparaturnya (peranan dominan ada pada aparat pajak).

(b) *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang perpajakan yang berlaku. Inisiatif kegiatan

menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak dalam sistem ini berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

(c) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya. Berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

f. Biaya menurut Undang – Undang Perpajakan

Untuk mendapatkan total Pajak Penghasilan yang terutang, kita harus menghitung terlebih dahulu besarnya laba bersih sebelum pajak, yang kemudian disesuaikan dengan koreksi fiskal untuk menghasilkan

laba fiskal atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Menurut Waluyo dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pajak (2016:214).

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, huruf a, e, g, dan h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Besarnya PKP bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- 1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)

tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11 A;

- (a) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- (b) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- (c) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
- (d) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- (e) Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan
- (f) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - (1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - (2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 - (3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
 - (4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

- (g) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- (h) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- (i) Kerugian selisih kurs mata uang asing
- (j) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- (k) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- (l) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - (1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - (2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - (3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - (4) Syarat dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagai

mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- (m) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur Peraturan Pemerintah;
- (n) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (o) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (p) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- (q) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tidak setiap biaya boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur untuk menentukan besarnya PKP bagi WPDN dan BUT ada yang tidak boleh dikurangkan sebagaimana angka 1, 2 dan 3 telah mengalami perubahan sehingga bunyinya demikian, yaitu :

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti

dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali :
 - (a) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - (b) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - (c) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 - (d) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 - (e) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - (f) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi

kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- 8) Pajak Penghasilan
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

g. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

Untuk mendapatkan laba fiskal, terlebih dahulu perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal yang dipengaruhi oleh faktor beda tetap dan beda temporer.

1) Beda Tetap

Perbedaan tetap timbul akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara pelaporan komersial dan fiskal. Akibat dari perbedaan ini berakibat juga pada laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang.

2) Beda Temporer

Perbedaan temporer dimaksudkan sebagai perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu aset atau kewajiban dengan nilai tercatat pada aset atau kewajiban yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang Waluyo, (2014:214-215).

Pajak yang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba/*profit* Setiyadi, (2016:9). Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan dan dihitung

berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Bagi Wajib Pajak (khususnya Badan) Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan perhitungan biasa.

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-42/PJ/2013 Tarif untuk perhitungan Pajak Penghasilan Terutang yang diatur didalam Pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, ada tiga cara perhitungan untuk mendapatkan pajak penghasilan terutang badan, yaitu :

1. Untuk peredaran bruto < 4,8 M, maka $50\% \times 25\% \times \text{PKP}$
2. Untuk Peredaran Bruto > 50 M, maka $25\% \times \text{PKP}$
3. Untuk Peredaran Bruto > 4,8 M < 50 M, maka:
[$(50\% \times 25\%) \times \text{PKP}$ memperoleh fasilitas] + [$25\% \times \text{PKP}$ tidak memperoleh Fasilitas]

B. Kerangka Konseptual

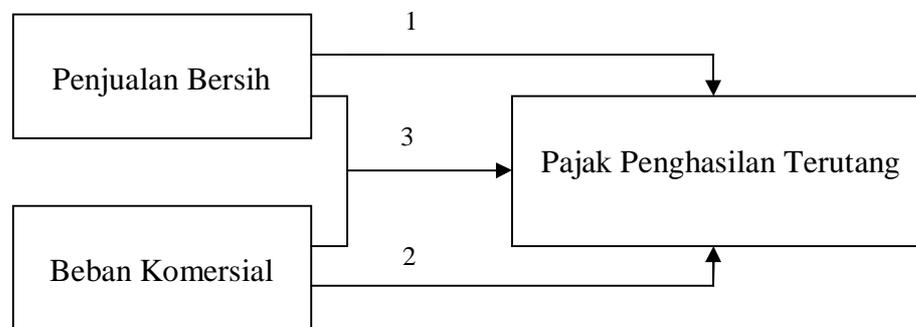
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan menjadi sumber penerimaan terpenting, karena pemasukan dari pajak yang memberikan sumbangsih terbesar untuk pembangunan negara. Salah satu jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan yang juga membantu dalam pengoptimalisasian pendapatan nasional jika dibantu oleh kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Setiap perusahaan pasti membuat laporan keuangan yang menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan

laba rugi terdapat penjualan yang memegang peranan penting dalam memperoleh laba yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Penelitian ini mengasumsikan bahwa dengan meningkatnya penjualan dan menurunnya beban komersial akan membawa pengaruh terhadap Pajak Penghasilan terutang.

Dari Kerangka Pemikiran diatas maka dapat dibentuk Kerangka Konseptual dari penelitian ini yaitu :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Penjualan Bersih berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2017
2. Beban Komersial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2017

3. Penjualan Bersih dan Beban Komersial secara Simultan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif – kausal. Tujuan dari penelitian asosiatif adalah untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, sedangkan tujuan dari penelitian kausal (sebab akibat) adalah untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara berbagai variabel.

B. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan berjumlah dua, yaitu variabel dependen atau variabel terikat (Y), dan variabel independen atau variabel bebas (X). Adapun pengertian atau definisi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (Y)

Menurut Erlina (2011 : 36) “variabel terikat atau variabel tak bebas ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel sebab atau variabel bebas. Jadi variabel dependen adalah konsekuensi dari variabel independen”.

a. Pajak Penghasilan Terutang

Dalam laporan laba rugi perusahaan Pajak Penghasilan terutang disebut sebagai pajak kini, dimana pajak kini menurut PSAK No. 46 paragraf ke 7 dijelaskan bahwa pajak kini (*current tax*) adalah jumlah

pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

Pajak penghasilan terutang adalah pajak yang dikenakan terhadap laba yang dihasilkan atau diperoleh perusahaan dalam satu Tahun Pajak Resmi, (2015:47). Dengan perkataan lain bahwa PPh terutang adalah laba fiskal dikali dengan tarif PPh Badan. Dalam laporan keuangan yakni dalam laporan laba rugi sering disebut dengan beban pajak kini.

2. Variabel Independen (X)

Dalam Erlina (2011 : 37) dikatakan bahwa variabel independen adalah “variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen, atau yang menyebabkan terjadinya variasi bagi variabel tak bebas (variabel dependen) dan mempunyai hubungan yang positif maupun negatif bagi variabel dependen lainnya”.

a. Penjualan Bersih

Penjualan Bersih merupakan pendapatan sebagai penghasilan yang timbul dari aktivitas normal perusahaan. Penjualan adalah kegiatan pelengkap atau *suplemen* dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi Assauri, (2013:23). Untuk menghasilkan laba yang maksimal perusahaan perlu melakukan kegiatan penjualan barang, dan bila barang tersebut sudah dijual maka pendapatan dilaporkan sebagai penjualan. Jadi, penjualan bersih adalah jumlah yang diterima dari penjualan setelah

dikurangi dengan nilai barang yang dikembalikan dan cadangan turunnya harga Rahardjo, (2009:48).

b. Beban Komersial

Beban Komersial adalah besarnya beban yang menjadi pengeluaran perusahaan yang dapat diakui sebagai biaya yang merupakan beban pokok penjualan, beban usaha, dan beban lain-lain.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data pada laporan keuangan, *annual report*, dan ringkasan kinerja perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 - 2017 dan telah dipublikasikan. Data diperoleh dari website BEI (www.idx.co.id).

Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Keterangan	Bulan																			
		Juni'18				Juli'18				Agustus'18				September'18				Oktober'18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra riset																				
2	Pengajuan Proposal																				
3	Pembuatan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Riset																				
6	Pengumpulan Data																				
7	Pengolahan Data																				
8	Sidang Meja Hijau																				

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Menurut Ridwan & Kuncoro, (2008) dalam Erlina, (2011:81) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2016 - 2017 yang berjumlah 66 perusahaan.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi yang telah dipilih oleh peneliti Erlina, (2011). Dalam penelitian ini sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampelnya berdasarkan kriteria tertentu yang sengaja digunakan berdasarkan pertimbangan, syarat, ataupun kuota tertentu Erlina, (2011). Proses *purposive sampling* menghasilkan 30 sampel dari populasi. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan adalah :

1. K1 : Perusahaan menerbitkan Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember dan telah di audit untuk tahun 2016 – 2017
2. K2 : Perusahaan memperoleh Laba untuk tahun 2016 – 2017
3. K3 : Laporan Keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah
4. K4 : Data yang dibutuhkan dalam penelitian tersedia pada Laporan Keuangan

Tabel 3. 2 Proses Pengambilan Sampel

- Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 - 2017	66
KRITERIA	JUMLAH
- Perusahaan yang tidak menerbitkan Laporan Keuangan untuk tahun 2016 – 2017 atau salah satu tahun penelitian	(16)
- Perusahaan yang tidak memperoleh Laba pada tahun 2016 – 2017 atau pada salah satu tahun penelitian	(16)
- Laporan Keuangan tidak disajikan dalam mata uang Rupiah	(4)
- Data yang dibutuhkan untuk penelitian tidak tersedia di dalam Laporan Keuangan	
Jumlah	30
Data Penelitian (30 x 2 tahun penelitian)	60

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi berdasarkan pada data yang telah ada pada sumber data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Laporan Keuangan dan *Annual Report* Perusahaan manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016 - 2017 yang menjadi sampel penelitian atau pada *website* www.idx.co.id

F. Teknik Analisis Data

Erlina (2011:31), mengemukakan bahwa: “Analisis data yaitu proses yang berkaitan dengan pengujian data dengan menggunakan teknik statistik tertentu, dimana hasil dari pengujian tersebut digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan.” Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan suatu gambaran atau deskripsi data melalui Penjabaran nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan deviasi standar dari setiap variabel penelitian.

2. Asumsi Klasik

a. Uji Multi kolinearitas

Uji multi kolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi di temukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen Ghozali (2001:91) Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multi kolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multi kolinearitas, artinya model regresi tersebut baik.
- 2) Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF di atas 10, maka terjadi masalah multi kolinearitas, artinya model regresi tersebut tidak baik.

b. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada priode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah

regresi yang bebas dari auto korelasi. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi Ghozali, (2011:95). Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji *Durbin Watson* (DW Test). Apabila nilai *Durbin Watson* berada di bawah angka 2 maka dikatakan data tersebut tidak terjadi autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai *Durbin Watson* adalah sebagai berikut:

- 1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas diuji dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut Ghozali, (2011:105) :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghazali, (2011: 110). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual mendistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pada analisis grafik dapat dilihat melalui grafik histogram apakah kurva membentuk kemiringan seimbang sisi kanan dan kiri serta membentuk lonceng dan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik P-Plot. Data dapat dikatakan normal atau tidak akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Jika data menyebar di atas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, dimana maka model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi dikatakan tidak memenuhi asumsi normalitas.

Pada analisis statistik dapat menggunakan *Kolmogorov-SmirnovZ* (1-Sample K-S), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam pengujian normalitas data, maka digunakan kedua cara diatas.

3. Metode Analisis

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses variabel-variabel yang ada sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berguna dan memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis berikut:

$$PPH = \alpha + \beta_1 SALES + \beta_2 EXP + \epsilon$$

Keterangan:

PPH = Pajak Penghasilan Terutang

SALES = Penjualan Bersih

EXP = Beban Komersil

A = konstanta

β = koefisien regresi variabel independen

ε = error

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghozali (2011:83)

Adjusted R Square (R^2_{adj}) merupakan R^2 yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi. Tidak seperti R^2 , R^2_{adj} tidak selalu meningkat apabila dilakukan penambahan variabel dalam model. Nilai R^2_{adj} selalu lebih kecil dari R^2 dan bisa memiliki nilai negatif. Jika R^2_{adj} bernilai negatif, nilai tersebut dianggap 0, atau dengan kata lain variabel independen sama sekali tidak mampu menjelaskan variasi dalam variabel independennya Harahap, (2013).

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Ghozali, (2011:84). Pengujian ini menggunakan Hipotesis Nol

(H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_1) yang masing-masing secara statistik dinyatakan sebagai berikut:

$$H_0: \beta_i = 0$$

$$H_1: \beta_i \neq 0$$

H_0 menyatakan parameter suatu variabel independen sama dengan nol, artinya suatu variabel independen tidak berpengaruh signifikan dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen. H_1 menyatakan parameter suatu variabel independen tidak sama dengan nol, artinya suatu variabel independen berpengaruh signifikan dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau pada taraf signifikansi (α) 5%. Statistik t akan digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut Harahap (2013):

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan pada $\alpha=5\%$, H_1 dapat diterima. Artinya suatu variabel independen berpengaruh signifikan dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 gagal ditolak pada $\alpha=5\%$. Artinya suatu variabel independen tidak berpengaruh signifikan dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Ghozali, (2011:84). Pengujian ini menggunakan Hipotesis

Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_1) yang masing-masing secara statistik dinyatakan sebagai berikut:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots = \beta_k \neq 0$$

- 1) H_0 menyatakan semua parameter secara simultan sama dengan nol, artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) H_1 menyatakan tidak semua parameter dalam model secara simultan sama dengan nol, artinya semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian ini menggunakan tingkat keyakinan 95% atau pada taraf signifikansi (α) 5%. Statistik F akan digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut Harahap, (2013):

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan pada $\alpha=5\%$, H_1 dapat diterima. Artinya variabel independen yang dimasukkan dalam model secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 gagal ditolak pada $\alpha=5\%$. Artinya variabel independen yang dimasukkan dalam model secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2016-2017 sebagai populasi penelitian yang berjumlah 66 perusahaan. Dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penyeleksian berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan, maka diperoleh 30 perusahaan sebagai sampel penelitian yang dikali dengan 2 tahun penelitian sehingga menghasilkan 60 unit analisis. Metode penelitian yang digunakan antara lain statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi berganda, uji hipotesis yang terdiri koefisien determinasi, uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t) . Tahapan pengolahan data dimulai dari menginput data masing-masing variabel ke *microsoft excel* kemudian data tersebut diinput ke dalam *software SPSS* versi 22 dan melakukan pengolahan terhadap data tersebut berdasarkan metode analisis data yang telah ditentukan.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang jumlah dari mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Berikut adalah hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
SALES	60	150,329,488,765	206,057,000,000,000	19,480,974,755,493.99	5,271,773,948,358.088	40,834,985,413,921.990
EXP	60	119,665,457,658	185,731,000,000,000	16,839,763,765,032.15	4,660,017,629,114.652	36,096,341,341,188.040
PPH	60	3,415,182,310	6,031,000,000,000	725,179,470,924.80	185,116,218,789.828	1,433,904,064,971.785
Valid N (listwise)	60					5

Sumber : hasil olahan *software* SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel Pajak Penghasilan terutang memiliki rata-rata Rp 725,179,470,924.80 dengan standar deviasi Rp 1,433,904,064,971.785 dan jumlah sampel 60, variabel penjualan bersih memiliki rata-rata Rp 19,480,974,755,493.99 dengan standar deviasi Rp 40,834,985,413,921.990 dan jumlah sampel 60, sedangkan variabel beban komersial memiliki rata-rata Rp 4,660,017,629,114.652 dengan standar deviasi Rp 36,096,341,341,188.040 dan jumlah sampel 60.

Perusahaan sampel dengan penjualan bersih tertinggi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Astra International Tbk sebesar Rp 206,057,000,000,000 dan terendah yaitu PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk sebesar Rp 150,329,488,765 Sedangkan perusahaan sampel dengan beban komersial tertinggi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Astra International Tbk sebesar Rp 185,731,000,000,000 dan yang terendah yaitu PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk sebesar Rp 119,665,457,658

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	181512,627	103850,815		1,016	,000		
	SALES	,101	,052	2,884	1,958	,000	,604	2,267
	EXP	-,081	,059	-2,030	-1,378	,000	,528	2,649

a. Dependent Variable: PPH

Sumber : hasil olahan *software* SPSS 22

Dari hasil uji multikolonieritas di atas dapat kita lihat melalui tabel *coefficients* bahwa nilai *Tolerance* untuk masing-masing variabel independen tidak kurang dari 0,1 dan untuk nilai *VIF* tidak lebih dari 10. Menurut Ghozali (2011) model regresi yang terbebas dari multikolonieritas mempunyai nilai *Tolerance* yang tidak kurang dari 0,10 dan *VIF* tidak lebih dari 10. Dengan demikian maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak mengandung gejala multikolonieritas di antara masing-masing variabel.

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pengganggu pada priode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu cara untuk melihat ada tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji *Durbin Watson* (DW Test).

Tabel 4. 3 Hasil uji *Durbin Watson* (DW Test).

Model Summary ^b						
Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,743 ^a	82,184	2	57	,000	2,016

a. Predictors: (Constant), EXP, SALES

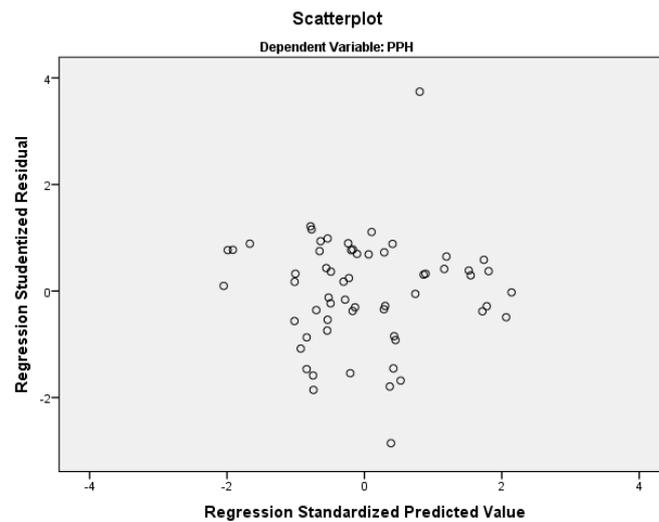
b. Dependent Variable: PPH

Sumber : hasil olahan *software* SPSS 22

Hasil dari Uji *Durbin Watson* (DW Test) menunjukkan nilai *Durbin Watson* berjumlah 2,016 Dasar pengambilan keputusan untuk uji autokorelasi dengan Uji *Durbin Watson* adalah jika nilai *Durbin Watson* berada di antara -2 sampai +2 maka tidak terjadi autokorelasi. Nilai *Durbin Watson* di atas menunjukkan bahwa nilai masih berada di antara -2 dan +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas diuji dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID).

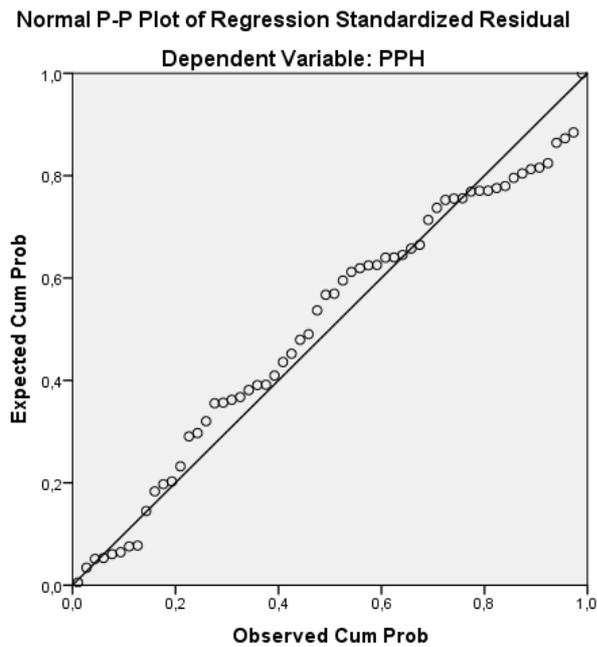


Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

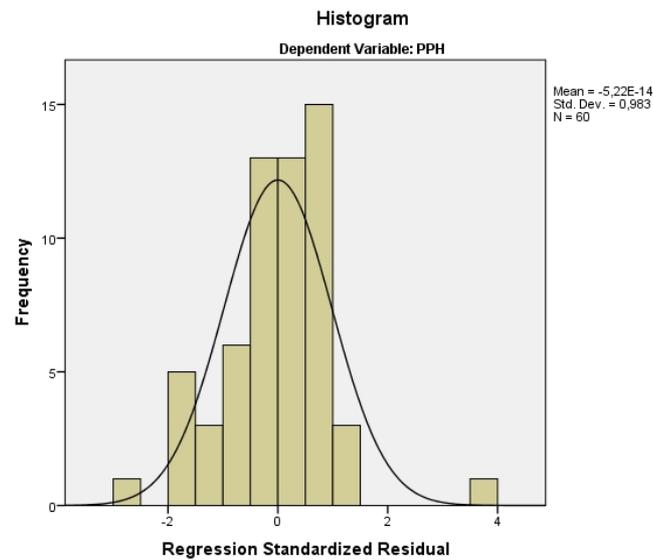
Pada gambar di atas dapat dilihat titik-titik tidak membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini lulus untuk uji heteroskedastisitas.

d. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual telah terdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu analisis grafik yang dilihat dari P-Plot dan histogram. Untuk hasil yang lebih akurat dilakukan uji statistik yaitu dengan *Kolmogorov-SmirnovZ* (1-Sample K-S). Berikut hasil dari uji normalitas :



Gambar 4. 2 Hasil Uji normalitas P-Plot



Gambar 4. 3 Hasil Uji normalitas Histogram

Hasil dari uji normalitas dengan analisis grafik P-Plot yang terlihat pada gambar 4.2 menunjukkan titik-titik menyebar diatas garis diagonal dan mengikuti arah dari garis diagonal maka data telah terdistribusi secara normal. Pada gambar 4.3 terlihat bahwa data terdistribusi mengikuti garis diagonal dan tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri serta membentuk

lonceng. Maka dapat disimpulkan data telah ditribusi secara normal. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, berikut adalah uji statistik :

Tabel 4. 4 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0333333
	Std. Deviation	,45135596
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,057
	Negative	-,095
Test Statistic		,095
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : hasil olahan *software* SPSS 22

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dari Uji *Kolmogorov-SmirnovZ (1-Sample K-S)* sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menguatkan hasil dari analisis grafik maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal dan lulus uji normalitas data.

3. Metode Analisis (Analisis Regresi Linear Berganda)

Menurut Ghozali (2011) hasil analisis regresi linear berganda adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$PPH = \alpha + \beta_1 SALES + \beta_2 EXP + + \varepsilon$$

Tabel 4. 5 Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	109904481512,627	108154303850,815		1,016	,000
	SALES	,101	,052	2,884	1,958	,000
	EXP	-,081	,059	-2,030	-1,378	,000

a. Dependent Variable: PPH

Sumber : hasil olahan *software* SPSS 22

Berdasarkan data di atas, dapat dirumuskan suatu analisis dari persamaan regresi linear berganda untuk Pajak Penghasilan Terutang (PPH) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2016-2017

$$\text{PPH} = 109904481512 + 0,101 \text{ SALES} - 0,081 \text{ EXP} + \varepsilon$$

1. Konstanta sebesar 109904481512 artinya jika variabel independen penjualan bersih dan beban komersial dianggap konstan atau (bernilai 0), maka PPh terutang nilainya sebesar 109904481512
2. Koefisien regresi penjualan bersih sebesar 0,101 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan penjualan bersih naik satu satuan maka akan menyebabkan PPh terutang naik sebesar 0,101 begitu juga sebaliknya jika nilai penjualan bersih turun satu satuan maka akan menyebabkan PPh terutang turun 0,101
3. Koefisien Regresi beban komersial sebesar 0,080, artinya jika variabel independen lainnya tetap dan beban komersial naik satu satuan maka akan menyebabkan PPh turun sebesar 0,080, begitu pula sebaliknya jika beban

komersial turun satu satuan maka akan menyebabkan PPh terutang naik sebesar 0,080.

4. Uji Hipotesis

a. Uji koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Ghozali (2011) nilai R^2 berada di antara 0 dan 1 dimana jika R^2 mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas dan jika R^2 mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan menurut Harahap (2013) pengaruh dari variabel-variabel independen dapat dilihat dari nilai R^2_{adj} . Jika R^2_{adj} bernilai negatif maka nilai tersebut dianggap 0 yang berarti variabel independen sama sekali tidak mampu menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,944 ^a	,892	,888	,63803

a. Predictors: (Constant), EXP, SALES

b. Dependent Variable: PPH

Sumber : hasil olahan *software* SPSS 22

Besarnya adjusted R^2 adalah 0,888, hal ini berarti 88,8% variasi Pajak Penghasilan terutang dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua

variabel independen yaitu variabel penjualan bersih dan beban komersial sedangkan sisanya 12,2% ($100\% - 88,8\% = 12,2\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel atau sebab-sebab lain di luar model.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara keseluruhan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Untuk uji F ini digunakan Hipotesis nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_1). H_0 berarti semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan H_1 berarti semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan pengambilan keputusan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada tingkat signifikan 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ H_0 diterima dan H_1 ditolak

Tabel 4. 7 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	191,642	2	95,821	35,384	,000 ^b
	Residual	23,204	57	,407		
	Total	214,845	59			

a. Dependent Variable: PPH

b. Predictors: (Constant), EXP, SALES

Sumber : hasil olahan *software* SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.7 Uji Simultan (Uji F) diperoleh nilai F_{hitung} 35,384 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan pada F_{tabel} tingkat signifikan

0,05 adalah 2,49. Hal ini berarti $F_{hitung} = 35,384 > F_{tabel} = 2,49$ dengan tingkat signifikansi $< 0,05 = 0,000$ maka, dapat disimpulkan bahwa variabel Penjualan Bersih (SALES) dan Beban Komersial (EXP) secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang.

c. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial bertujuan untuk melihat apakah satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada uji digunakan H_0 yang berarti satu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan H_1 yang berarti satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) pengambilan keputusan untuk masing-masing hipotesis adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti satu variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti satu variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5,465	1,434		-3,810	,000
	SALES	3,364	,505	3,024	6,658	,000
	EXP	-2,312	,497	-2,111	-4,648	,000

a. Dependent Variable : PPH

Sumber : hasil olahan *software* SPSS 22

Kedua variabel independen yaitu penjualan bersih dan beban komersial signifikan pada 0.05. Dari sini dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Penghasilan terutang dipengaruhi oleh penjualan bersih dan beban komersial

Dengan melihat tabel di atas dapat diketahui:

1) Pengaruh penjualan bersih terhadap Pajak Penghasilan terutang.

Hasil uji koefisien pada tabel 4.8 didapat t hitung 6,658 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena tingkat signifikan di bawah 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel ($6,658 > 3,810$), maka secara parsial variabel penjualan bersih berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan terutang.

2) Pengaruh beban komersial terhadap Pajak Penghasilan terutang.

Hasil uji koefisien pada tabel 4.8 didapat nilai t hitung untuk beban komersial sebesar - 4,648, dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena tingkat signifikansi di bawah 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel ($4,648 > 3,810$), maka secara parsial variabel beban komersial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan terutang.

B. Pembahasan

Berdasarkan uji Statistik F diperoleh nilai F_{hitung} 35,384 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan pada F_{tabel} tingkat signifikan 0,05 adalah 2,49. Hal ini berarti $F_{hitung} = 35,384 > F_{tabel} = 2,49$ dengan tingkat signifikansi $< 0,05 = 0,000$ maka, dapat disimpulkan bahwa variabel Penjualan Bersih (SALES) dan Beban Komersial (EXP) secara simultan

atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2017. Untuk Uji Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan besarnya adjusted R^2 adalah 0,888, hal ini berarti 88,8% variasi Pajak Penghasilan terutang dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu variabel penjualan bersih dan beban komersial sedangkan sisanya 12,2% ($100\% - 88,8\% = 12,2\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel atau sebab-sebab lain di luar model.

Untuk uji parsial (uji t) yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh hasil, pada variabel Pengaruh penjualan bersih diperoleh nilai t hitung 6,658 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena tingkat signifikan di bawah 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel ($6,658 > 3,810$), untuk koefisiennya menunjukkan nilai positif. Maka secara parsial variabel penjualan bersih berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan terutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan Yulianti (2008), yang menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Badan terutang dipengaruhi secara positif oleh *Debt to Equity Ratio* (DER), selain itu juga sejalan dengan penelitian Muhammadiyah (2006) dalam Yulianti (2008), yang menyatakan bahwa DER berpengaruh positif terhadap harga saham. Harga saham dan Pajak Penghasilan terutang merupakan refleksi dari laba perusahaan Yulianti, (2008). Proporsi utang dan modal yang optimal dengan pengelolaan yang baik dapat meningkatkan laba perusahaan, yang selanjutnya meningkatkan pula harga saham dan Pajak Penghasilan terutang. Selain itu penelitian

ini sejalan dengan Sanwanih (2006), yang menyatakan bahwa laba setelah pajak (*Earning After Tax*) secara signifikan dipengaruhi oleh penjualan bersih. Menurut Resmi (2005:139) penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memperbesar perbandingan antara utang dan modal (DER). Dengan memperbesar jumlah utang, maka dapat mempertinggi rasio DER sehingga beban bunga yang merupakan bagian dari beban komersial dapat menjadi pengurang pajak yang relatif besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penambahan ataupun pengurangan penjualan bersih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah Pajak Penghasilan terutang perusahaan tersebut.

Untuk beban komersial mempunyai nilai t hitung sebesar -4,648, dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena tingkat signifikansi di bawah 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel ($4,648 > 3,810$), maka secara parsial variabel beban komersial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan terutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan Yulianti (2008) yang menyatakan bahwa beban penyusutan dan beban bunga yang dibayarkan untuk utang semakin memperkecil nilai laba perusahaan yang pada akhirnya mengecilkan pula nilai Pajak Penghasilan terutang. Menurut Floyd A. Beams dkk. (2007:129) untuk menghindari pembayaran pajak yang sebelumnya dihindari, perusahaan menghindari likuidasi LIFO berlapis yang menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih rendah, laba bersih yang lebih tinggi, dan tagihan pajak yang lebih tinggi. Dengan menggunakan metode persediaan LIFO (*Last In First Out*) perusahaan

dapat meningkatkan harga pokok penjualan yang termasuk satu di antara beban komersial, sehingga mengurangi laba kena pajak dan Pajak Penghasilan terutang. Jadi, perusahaan menggunakan metode LIFO untuk tujuan perpajakan. Persediaan dengan lapisan LIFO dapat dilikuidasi selama periode interim namun diharapkan dapat digantikan pada akhir tahun Beams dkk., (2007:129), dikarenakan sebenarnya metode ini tidak boleh digunakan untuk tujuan laporan keuangan tahunan.

Bagi perusahaan peningkatan beban komersial dapat membawa pengaruh positif yaitu penghematan PPh terutang, akan tetapi bagi pemerintah (fiskus), jika perusahaan meningkat beban komersialnya tentu penerimaan dari sektor PPh Badan akan berkurang. Untuk itu peningkatan beban komersial yang terkait dengan perhitungan PPh terutang perlu mendapat pengawasan yang lebih karena dapat mengindikasikan adanya penghindaran pajak. Salah satu caranya dengan lebih memperhatikan isi peraturan pada pasal 6 ayat 1 UU PPh Tahun 2008 mengenai biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial, Penjualan Bersih berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2017.
2. Secara parsial, Beban Komersial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2017.
3. Secara simultan Penjualan Bersih dan Beban Komersial secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2017.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan atas dasar kesimpulan dan keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperpanjang periode penelitiannya misalnya 3 atau 4 tahun dan sebaiknya

mempertimbangkan variabel-variabel lainnya yang secara teori mungkin dapat mempengaruhi Pajak Penghasilan Terutang seperti Rasio *Gross profit*, Rasio *Operating profit*, DER (*Debt to Equity Ratio*), dll.

2. Bagi perusahaan maka perlu memperhatikan nilai penjualan bersih yang terealisasi dalam satu periode tertentu, sehingga dapat melihat pula bagaimana perlakuan efisiensi biaya.
3. Bagi pemerintah perlu memperhatikan kondisi perekonomian untuk menunjang pendapatan dari segi pajak, khususnya Pajak Penghasilan Badan. kondisi ekonomi kondusif yang dapat meningkatkan perform perusahaan adalah memperlancar arus distribusi barang produksi serta stabilisasi dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dimana BBM merupakan biaya pada proses produksi manufaktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, Sofjan. (2013). *Manajemen Pemasaran Dasar – dasar, Konsep dan Strategi Edisi 1*. Jakarta : Rajawali Pers
- Azhari, Andy. 2015. *Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi pada Perusahaan pnerbit daftar efek syariah sektor properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014)*. Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Beams, Floyd A *et al.* (2017). *Akuntansi Lanjutan Jilid 2 Edisi 8*. (Terjemahan oleh Chalie Saputra). Jakarta : PT INDEKS.
- Casavera. (2009). *Seri Perpajakan Indonesia 5: Undang-Undang No. 36 2008 tentang Perubahan dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Erlina. (2011). *Metodologi Penelitian*. Medan : Art Design, Publishing & Printing.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2012). *Teori Akuntansi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- (2013). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2009). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Ekonomi UMSU : Medan
- Kotler, Philip. (2016). *Manajemen Pemasaran*. (alih bahasa Hendra Teguh, Ronny A Rusli, dan Benyamin Molan). Jakarta : PT INDEKS.

- Kusumadewi, Novia (2008). *Pengaruh Penjualan dan Beban Komersial terhadap Pajak Penghasilan Perusahaan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Nilam, Endah. (2010). *Analisis Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Badan Terutang*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Pieloor, Freddy. (2010). *Ekonomi Makro Cetakan II*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Putri, Nindri. (2015). *Pengaruh Modal Sendiri dan Utang Jangka Panjang terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi Universitas Pakuan. Bogor
- Rahardjo, Budi. (2009). *Laporan Keuangan Perusahaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Resmi, Siti. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rudianto. (2009). *Akuntansi Biaya*. Jakarta : Salemba Empat.
- Salamah, dkk. (2015). *Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012 – 2014)*. PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Sanwanih. (2006). *Analisis Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Pajak terhadap Laba setelah Pajak pada Industri Makanan dan Minuman*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Jakarta.
- Simamora, patar dan Muhammad Ressa. (2015). *Analisis Pengaruh Struktur Modal terhadap Pph Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIAFE). Vol 1 No. 2 : Hal 21-2-31, E-ISSN : 2502-4159.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sucipto. (2010). *Penilaian Kinerja Keuangan*. Medan : Jurnal Akuntansi Universitas Sumatra Utara Digital Library.

Sugiyono. (2009). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.

Waluyo. (2014). *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Salemba empat.

Yulianti, Nur Wachidah. (2008). *Analisis Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan Terutang* : Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Jakarta.

www.idx.co.id

www.indonesian-industry.com

www. Pajak.go.id

www.sahamoke.com